IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI

Elita, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas,Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementing the Policy of the Islamic Maghreb Community Movement. This study aims to determine the implementation of the Magrib Mengaji community movement policy in Tapung Hilir District. This type of research is a descriptive qualitative approach. The research informants consisted of Officials and Staff of the Ministry of Religion in Kampar District, Ulama and Community Stores. Data collected through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Koran community movement policy in the Tapung Hilir sub-district is not well implemented because there are still obstacles that hamper the implementation of the policy, and the impact of the existence of the study sunset recitation policy in the Tapung Hilir sub-district has not significantly positive impact.

Key words: implementation, magrib reciting, impact

Abstrak: Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan gerakan masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Tapung Hilir. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri Pejabat dan Staf Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Ulama dan Toko Masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan gerakan masyarakat mengaji di kecamatan Tapung Hilir tidak terimplementasi dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang menghambat dalam pengimplementasian kebijakan, dan adapun dampak dari adanya kebijakan magrib mengaji di Kecamatan Tapung Hilir belum berdampak positif secara signifikan.

Kata kunci: implementasi, magrib mengaji, dampak

PENDAHULUAN

Budaya mengaji diwaktu magrib sudah tertanam sejak lama, menimbang begitu banyak masyarakat kita yang beragama islam, Gerakan masyarakat magrib mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Al-Qur'an setelah shalat magrib. Dikalangan masyarakat membaca Al-qur'an atau mengaji sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Namun, akhir-akhir ini mengaji sudah mulai ditinggalkan. Tempat ibadah seperti masjid, mushalla, surau dan lain-lain sudah banyak yang kosong, tidak adalagi aktifitas pengajian. Masjid atau surau yang dulu selalu ramai di isi oleh masyarakat. Namun sekarang semakin sepi. Para orang tua lebih memilih menonton TV, sedangkan untuk para anak-anak lebih me-

milih berkumpul atau nongkrong di tempat makan atau di tepi-tepi jalan dengan sibuk bermain gadget .

Sungguh pemandangan yang sangat memilukan, bagaimana bisa anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa sibuk dengan game-online dan gadget, seakan mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka hanya terfokus pada dunia mereka masing-masing. Semakin hari rumah ibadah semakin sepi, suara adzan yang berkumandang 5 kali dalam sehari semakin terabaikan. Budaya yang dulu selepas magrib anak-anak sibuk berebut Al-Quran dan berebut untuk menjadi yang paling pertama dalam barisan mengaji sekarang sudah tiada lagi. Arus perkembangan zaman dan

perkembangan media massa elektronik pada saat ini telah melahirkan pergeseran nilai, budaya, kultur, dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan lebih-lebih di pedesaan. Dan akibatnya telah melahirkan perubahan sosial yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat, imbasnya tradisi baik pada kelompok masyarakat pada saat ini telah tergerus oleh asupan budaya dan nilai-nilai yang bersebrangan dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia termasuk budaya maghrib mengaji. Mazmanian dan Sebastiar mendefinisikan bahwa implementasi adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Leo Agustino:201).

Menurut kamus Webster implementasi ialah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Solihin Abdul Wahab : 2005). Pressman dan Wildavsky mendefinisikan bahwa implementasi ialah “suatu kata kerja yang mana sudah sepan-tasnya berkaitan langsung dengan kata kebijaksanaan” (Solihin Abdul Wahab : 2005). Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa implementasi ialah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Leo Agustino : 2014).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart bahwa implementasi ialah “sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik”. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administrasi.

James Anderson menyatakan bahwa “implementasi kebijakan atau program merupakan bagian dari administrative process atau Proses Administrasi. Proses administrasi sebagaimana diistilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan system administrasi yang terjadi

pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan , isi dan dampak suatu kebijakan.

Seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach mendefinisikan bahwa implementasi ialah “cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit untuk merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien” (Leo Agustino : 2014).

Menurut Edward implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. (Winarno, 2014)

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

Penyiapan sumber daya, unit dan metode Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua cara, yaitu pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho : 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Tapung Hilir.

METODE

Penelitian ini masuk dalam jenis Deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari: Kabag Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Penyuluh Agama Kabupaten Kampar, Camat Tapung Hilir, Ulama, dan Toko Masyarakat di beberapa desa di kecamatan Tapung Hilir. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data Berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL

Komunikasi

Dalam hal komunikasi untuk peraturan Daerah tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Kecamatan Tapung Hilir sudah ada dilakukannya komunikasi dalam bentuk sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada Camat-Camat yang ada di Kabupaten Kampar, serta Kepala Desa-Kepala Desa dari Desa-desa yang ada di kabupaten Kampar, dan khususnya di Kecamatan Tapung Hilir. Tetapi sangat disayangkan sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas mensosialisasikan peraturannya saja, dalam artian bahwa didalam kegiatan sosialisasi tidak membahas secara menyeluruh dan terperinci apa saja yang menjadi tanggungjawab dan hak sebagai enaga pengajar, dan seberapa besar penga-

wasan atau control mereka terhadap terlaksananya peraturan daerah tersebut.

Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia dalam implementasi peraturan Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Kecamatan Tapung Hilir belum ada mendapat pelatihan serta pembinaan, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS di tingkat RT, RW maupun penyuluh agama yang ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Tentu itu tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Kampar tentang gerakan masyarakat magrib mengaji, yang mana para tenaga pengajar mendapatkan hak selain insentif dari pemerintah, juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari penyuluh agama atau yang di utus dari kementerian agama kabupaten Kampar.

Disposisi

Sikap pelaksana atau disposisi yang ada di Kecamatan Tapung Hilir dalam hal pelaksanaan peraturan magrib mengaji masih banyak yang blm mengerti dan tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam peraturan daerah tersebut. tentu hal ini mengakibatkan bias pada pemahaman masyarakat luas. Masyarakat hanya mengetahui sebatas adanya peraturan tentang magrib mengaji, yang mereka pahami bahwa diwaktu magrib tidak diperbolehkan keluar dan di anjurkan untuk mengaji, baik itu dirumah, di masjid ataupun di mushalla.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah dari pada di tingkat atas. Birokrasi merupakan suatu susunan sekumpulan orang yang melaksanakan suatu kebijakan. Dimana didalam peraturan daerah kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji telah diatur, siapa-siapa saja yang terlibat

dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan peraturan magrib mengaji tersebut. Tentu dalam pelaksanaan peraturan tersebut banyak melibatkan orang-orang yang dianggap penting, mulai dari tingkat atas selaku yang mengesahkan kebijakan, hingga tingkat bawah yaitu desa.

Dampak Implementasi Peraturan Daerah Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Dampak yang dirasakan oleh orang tua pada umumnya setelah adanya Peraturan Magrib ini adalah masih belum berdampak positif secara signifikan, hal itu dikarenakan diharapkan dengan adanya peraturan daerah tentang magrib mengaji ini anak-anak muda khususnya anak muda dan masyarakat Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mengalami perubahan yang signifikan, dimana lebih menyemarakkan masjid, dan mushalla. Dan para orang tua lebih semangat ke masjid shalat magrib dan isya' secara berjamaah. Tetapi itu semua belum ada perubahan yang signifikan. Masyarakat yang memang pergi ke masjid atau mushalla hanya mereka yang benar-benar sejak dulu sebelum adanya peraturan ini mereka telah melakukannya, telah membudaya dan memiliki kesadaran lebih dari yang lain. Sehingga dengan sendirinya masih tetap terus melangkah kakinya menuju masjid atau mushalla.

PEMBAHASAN

Mengingat pentingnya kegiatan magrib mengaji ini, tentu pemerintah mengadakan dan mengesahkan peraturan ini dengan pertimbangan yang matang, dimana tujuan utama dari peraturan Daerah kabupaten Kampar tentang gerakan masyarakat Magrib mengaji ini adalah agar kedepannya masyarakat kabupaten Kampar lebih agamis, dan lebih menyemarakkan Al-Qur'a, dan tentunya untuk membentuk generasi bangsa yang berahlak dan bermoral sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang memiliki akhlak dan moral yang berbudi pengerti yang sopan santun dan tetap memegang teguh agama Allah, dan tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan keru-

gian yang panjang. Dalam implemtasi peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka kita bisa menilainya dari beberapa inikator yang peneliti gunakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi yang terjadi di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut memang sudah dilaksanakan. Hal ini dalam dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dimana mereka pihak Kecamatan Tpaung Hilir sudah ada usaha untuk melaksanakan sosialisasinya. Tetapi sangat disayangkan dalam sosialisasi yang mereka lakukantidak hanya membahas tentang gerakan masyarakat magrib mengaji saja. Yaitu mereka selama ini tidak pernah menyediakan waktu khusus yang memang benar-benar hanya di sediakan untuk sosialisasi tentang kebijakan daerah magrib mengaji ini. Mereka hanya menyisipkan pada setiap ada perkumpulan, hal tersebut dikarenakan berbagai alasan diantaranya anggaran yang tidak ada untuk mengadakan kegiatan tersebut.

Tentu dampak dari hal tersebut ialah kurang jelasnya apa yang seharusnya di sosialisasikan, dimana didalam peraturan tersebut mengatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang tenaga pengajar mengaji, dan juga membahas standar atau kualifikasi seseorang untuk dapat menjadi tenaga pengajar magrib mengaji, dan masih banyak lagi apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. tetapi dikarenakan kurangnya komunikasi yang jelas mengakibatkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh mereka hanya secara umum saja.

Sumber Daya

Sumberdaya merupakan salah indikator yang menentukan terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan, dimana sebuah kebijakan itu dilaksanakan oleh manusia yang disebut birokrat. Sehingga untuk menjadikan

terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan tersebut maka dibutuhkan sumberdaya yang memang memahami, dan mengerti, dan luput juga sumberdaya yang memang sesuai dengan apa yang menjadi sop atau Standar Oprasional Prosedur. Untuk kegiatan magrib mengaji ini kita tentu melihat bagaimana tenaga pengajar mengaji itu mendidik murid-muridnya. Ternyata hal tersebut telah diatur dan memiliki kriteria tertentu. Dan untuk kecamatan tapung hilir sendiri sumberdaya tenaga pengajar masih begitu kekurangan, baik itu dari segi jumlah dan juga pendidikan mereka. Rata-rata mereka yang menjadi tenaga pengajar itu tidak memiliki riwayat pendidikan yang keagamaan. Mereka banyak yang hanya memiliki pendidikan terakhir SD dan SMP.

Selain sumberdaya dari tenaga pengajar, sumber daya juga meliputi fasilitas pengajaran. Dimana masih banyak ditemui anak-anak yang mengaji itu tidak memiliki meja, dan Iqra' atau Al-Qur'an sendiri. Tentu hal tersebut sangat disayangkan, dikarenakan didalam peraturan tersebut telah diatur kurikulum pembelajaran, salah satunya menulis. Tetapi masih banyak di temui yang tidak sesuai dengan apa yang telah dia atur dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang magrib mengaji.

Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana, dimana sikap pelaksana yang diharapkan adalah memahami dan menguasai pada kewajiban dan tanggungjawab pelaksana. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam pada tingkat kecamatan mereka dituntut agar lebih memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan serta apa-apa saja yang harus dilakukan agar terlaksananya kebijakan magrib mengaji ini. Karena jika pada tingkat kecamatan benar-benar yang memahami peraturan tersebut. Maka itu dapat menjadi tempat bertanya sekaligus pengawas di desa-desa yang ada di Kecamatan Tapung hilir.

Didalam peraturan daerah tentang gerakan masyarakat magri mengaji, diatur didalamnya tercantum tentang pembinaan yang diperoleh tenaga pengajar dari pihak kabupa-

ten kementerian agama dan juga markas islam center, disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Mahgrib mengaji masih belum maksimal, hal ini dikarenakan yang benar-benar memahami bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh para pelaksana kebijakan hanya di bagian pusat, masyarakat Kecamatan Tapung Hiliri, terutama para tenaga pengajar mengaji masih banyak yang belum mengetahui dan memahami bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam melaksanakan Perda.

Struktur Birokrasi

Definisi sederhana tentang struktur birokrasi ialah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah dari pada ditingkat atas. Birokrasi merupakan suatu susunan sekumpulan orang yang melaksanakan suatu kebijakan. Suatu implementasi kebijakan dapat di katakan berhasil atau tidak itu dapat dinilai dari beberapa indikator diantaranya yaitu struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan sudah tersedia, ataupun para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang memang seharusnya dilakukan serta memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, suatu kebijakan dapat saja mungkin tidak dapat terlaksana atau terealisasi dikarenakan lemahnya dalam struktur birokrasi nya.

Struktur birokrasi yang dimaksud disini oleh peneliti yaitu jenjang atau urutan secara hirarki para pelaksana kebijakan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji ini pelaksana yang tertinggi terletak di tingkat Pemerintahan Daerah pusat, kemudian ditingkat Kecamatan serta ke Desa. Pihak kementerian Agama Kabupaten Kampar menyadari bahwa kebijakan tentang gerakan masyarakat magrib mengaji untuk Kabupaten Kampar melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak pusat seperti Bupati, dan jajarannya hingga tingkat Desa.

Dampak Implementasi kebijakan magrib mengaji

Peraturan daerah tentang gerakan masyarakat magrib mengaji ini diharapkan dapat melahirkan dampak yang bagus untuk masyarakat kabupaten Kampar khususnya untuk Kecamatan Tapung Hilir sendiri. Tetapi kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan, itu berpengaruh besar terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Semakin kecil sanksi yang diberikan kepada yang melanggar, maka semakin banyak yang melanggar. Sungguh sangat disayangkan ketika suatu kebijakan yang memang bertujuan baik tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan hanya karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kebijakan itu sendiri.

Saat kita membahas terkait soal sanksi, maka disini peran orang tua sangatlah penting. Hal ini dikarenakan kewajiban yang terbesar untuk mendidik anak-anak nya untuk menjadi orang yang benar-benar bermanfaat di hari kemudia hanyalah orang tua. Anak merupak suatu amanah yang Allah titipkan kepada orang tua sehingga orang tua yang sangat berperan penting dalam kecerdasan anak, dalam membentuk etika sejak dini. Sehingga jika para orang tua memiliki kesadaran yang penuh, maka mereka sebenarnya tidak perlu menunggu hadirnya suatu peraturan seperti ini, tanpa ada suatu peraturan yang menyuruh atau menghimbau untuk melakukan kegiatan belajar mengaji di waktu magrib. Para orang tua dengan sendirinya mengerti bahwa hal ini penting sampai-sampai pemerintah membuat suatu kebijakan untuk masyarakatnya, tetapi saat didalam peraturan tersebut memiliki beberapa kekurangan, seperti belum adanya kejelasan akan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar, disini lah peran orang tua sebagai pengawas.

SIMPULAN

Adapun hasil penelitian yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut: Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji di Kecamatan Tapung Hilir tidak terlaksana dengan maksimal, hal ini di karenakan masyarakat Kecamatan Tapung Hilir memang sudah mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji ini, tetapi dalam melaksanakan kegiatan Maghrib mengaji itu masih berdasarkan pemahaman masing-masing

Adapun dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar belum berdampak positif, dampak positif yang diharapkan belum terlihat secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak anak-anak yang berkegiatan di luar rumah diwaktu shalat magrib sampai dengan waktu shalat isya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yang mana didalamnya semua terlibat dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah Kecamatan dan Desa, bahkan sampai ke Ninik Mamak. Alim Ulama, dan juga masyarakat lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Reformasi keimplementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Agustino Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho Riant. 2009. Public Policy. Jakarta. Gramedia.
- Winarto Budi. 2014. Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta. Center of Academic Publising Servic